

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI CENGKEH  
DI DESA BENTENG GANTARANG KECAMATAN GANTARANG  
KABUPATEN BULUKUMBA**



Disusun dan Diajukan Oleh :

Saenal Akbar HS

NomorStambuk : 10561 03701 10

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

## PERSETUJUAN

Judul skripsi : Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani  
Cengkehdi Desa Benteng Gantarang Kecamatan  
Gantarang Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : SAENAL AKBAR HS

Nomorstambuk : 10561 03701 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Saenal Akbar HS

Nomor Stambuk : 10561 03701 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 19 September 2015

Yang Menyatakan,

Saenal Akbar HS

## PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh panitia ujian skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1691/FSP/A1-VIII/IV/36/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (SI) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari jumat 25 Agustus tahun 2017



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahk memenuhi snya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
2. Selaku pembimbing I dan selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Idris M.Si selaku dekan fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.

4. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juni 2016

Saenal Akbar Hs



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENERIMAAN TIM</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep peran pemerintah .....	10
B. Tugas dan Fungsi Pemerintah.....	16
C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pertanian.....	21
D. Tinjauan tentang pertanian .....	27
E. Kerangka Pikir.....	33
F. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Informan Penelitian .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38

F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	41
B. Karakteristik Objek Penelitian.....	45
C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Bulukumba.....	51
D. Faktor-faktor pendukung peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Mengenai Permasalahan Yang Diteliti .....	37
Tabel 2 Banyaknya Desa Kelurahan Lingkungan, Dusun Yang Ada Di Kab.Bulukumba .....	42
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan.....	46
Tabel 4 Luas Area Produksi Komoditi Cengkeh.....	49
Tabe 5 Identitas responden petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba .....	50



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 bagan kerangka fikir .....	33
2. Gambar 2 model analisi interaktif .....	40
3. Dokumentasi penelitian .....	73
a. Gambar 1 .....	73
b. Gambar 2 .....	73
c. Gambar 3 .....	73
d. Gambar 4 .....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia ke arah globalisasi di segala bidang kehidupan yang meliputi bidang politik, teknologi, ekonomi, pertanian, sosial dan budaya telah membawa banyak dampak, baik positif maupun negatif. Globalisasi dapat memacu kemajuan yang sangat pesat terhadap perkembangan suatu negara. Sebaliknya, globalisasi akan dirasa memberikan dampak buruk bagi negara yang tidak memiliki kesiapan dalam proses globalisasi. Menurut Rahman (2008:115) Globalisasi membawa konsekuensi yang cukup rumit bagi setiap negara, terutama negara-negara berkembang, globalisasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, dan penyebab utama globalisasi saat ini adalah kemajuan teknologi informasi, dan komunikasi.

Globalisasi ekonomi adalah salah satu proses yang dapat dilihat secara nyata dan membawa dampak terhadap bidang kehidupan yang lain. Di bidang ekonomi globalisasi sangat membutuhkan kesiapan suatu negara untuk menerimanya, terlebih dukungan sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi, terutama kemampuan untuk menerapkan teknologi. Globalisasi ekonomi dimaksudkan sebagai proses terintegrasinya perekonomian negara-negara ke arah masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, saling tergantung, dan saling pengaruh mempengaruhi. Bertitik tolak dari fenomena diatas, globalisasi ekonomi dapat melahirkan pasar global. Di samping melahirkan pasar bebas, globalisasi ekonomi juga melahirkan kapitalisme, di mana menurut Haryanti (2005:101)

kecepatan komodifikasi kapitalisme, tak lain dari kecepatan mengaitkan segala aspek kehidupan dengan perputaran uang. Waktu, ruang, uang, dan kecepatan merupakan empat unsur yang tidak bisa dipisahkan dari wacana kapitalisme global. Secara singkat kapitalisme adalah bagaimana modal dan kapital dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan.

Sejalan dengan perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi serta perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi, maka pembangunan sektor pertanian tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional, karena justru pertumbuhannya meningkat. Sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia ;Potensi sumberdayanya yang besar dan beragam, Besarnya penduduk yang bergantung hidupnya pada sektor ini dan Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan miskin adalah sesuatu hal yang sangat ironis terjadi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian secara keseluruhan.

Indonesia yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke merupakan “Negara Kepulauan ”, Di samping mempunyai kekayaan laut yang melimpah, hasil tambang, dan juga memiliki tanah subur untuk pertanian dan perkebunan. Tidak salah kalau grup penyanyi Koesplus menciptakan lagu dengan syair yang menyanjung kekayaan alam dan kesuburan bumi pertiwi

yang dimiliki bangsa Indonesia. Seperti terdapat pada syair “ orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Dari syair tongkat kayu dan batu jadi tanaman menandakan betapa suburnya tanah air Indonesia. Berbagai hasil bumi dari bercocok tanam, baik pada lahan basah (sawah) maupun lahan kering (perkebunan) telah menghidupi rakyatnya, bahkan telah menjadi komoditi yang diperjualbelikan. Selain beras sebagai makanan pokok yang dihasilkan dari bercocok tanam padi, juga ada palawija seperti ; jagung, kacang tanah, kedelai, dan tanaman cengkeh yang saat ini memiliki nilai jual yang cukup besar.

Hasil pertanian dan perkebunan yang disebutkan tidak lepas dari peran para petani, baik yang menggarap lahan basah maupun lahan kering. Akan tetapi, keberadaan petani di Indonesia masih terpinggirkan. Kenyataan empiris sering tidak sejalan dengan tataran teoretis, yaitu petani sangat berperan sebagai aset bangsa yang menghidupi hajat hidup orang banyak, terutama dengan produksi hasil pertanian baik beras, palawija, kopi, cengkeh, dan hasil pertanian lainnya. Jasa yang begitu besar disumbangkan oleh petani tidaklah seimbang dengan imbalan yang diterima oleh petani tersebut. Banyak petani yang terjepit karena harga pupuk yang melambung, harga hasil panen yang anjlok tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk biaya produksi.

Dalam rangka melindungi petani khususnya petani cengkeh, pemerintah melalui Inpres No.50 Tahun 1976 menetapkan kebijakan Tata Niaga Cengkeh. Disusul kemudian Keppres No.8 Tahun 1980 yang menetapkan kebijakan harga dasar dan pelaksanaan kegiatan penyanggaan cengkeh oleh PT Kerta

Niaga. Konon maksudnya, disamping melindungi para petani juga untuk meningkatkan peranan koperasi (KUD), serta menjamin tersedianya cengkeh bagi konsumen yakni pabrik rokok kretek. Anjloknya harga cengkeh ini pada saat dahulu, juga melahirkan apa yang dinamai Konsorsium Cengkeh Nasional (KCN) dan disusul Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada Desember 1990. Namun kebijakan pemerintah menampung semua cengkeh yang diproduksi petani sejak tahun 1991 melalui BPPC, telah menimbulkan stok cengkeh nasional yang berlebihan secara akumulatif. Stok cengkeh per 1 Januari 1995 misalnya mencapai 65.000 ton setiap tahunnya.

Kebijakan pemerintah membentuk KCN dan BPPC itu, telah membuahkan kritikan karena kemelut harga cengkeh terus berlanjut. Apalagi, dalam lembaga itu ditenggarai jelas-jelas mengandung unsur monopoli. Buntutnya, KCN dan BPPC pun dibubarkan dan tata niaga cengkeh dihapus. Perdagangan cengkeh dikembalikan ke pasar bebas sejalan dengan tuntutan dari Negara-negara anggota WTO, seperti Madagaskar dan Tanzania, agar Indonesia membuka impor cengkehnya. Dihapusnya tata niaga (yang sebenarnya lebih cocok disebut monopoli) cengkeh itu, langsung mendongkrak harga cengkeh. Secara pelan dan pasti harga cengkeh terus meroket. Penyebab terus meroketnya harga cengkeh ini, tidak lain karena berkurangnya pasokan dari petani secara signifikan. Sudah menjadi rahasia umum, saat harga cengkeh anjlok (ditangani BPPC) banyak petani cengkeh yang membat habis tanaman cengkehnya. Hal yang sama juga menimpa para petani cengkeh, khususnya di Sulawesi selatan pada daerah-daerah sentra penghasil cengkeh, salah satunya adalah kabupaten Bulukumba. Para petani

sering mengalami kesulitan ketika memasarkan hasil panen cengkehnya, karena harga sering berfluktuasi. Dulu peran BPPC yang dimotori oleh pengusaha nasional Tomi Soeharto dengan menunjuk Nurdin Halid sebagai Ketua Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), yang memonopoli harga cengkeh yang dipasarkan petani (Haryanti, 2005:54). Secara konsep badan ini bertujuan membantu petani, namun kenyataan mencekik leher petani cengkeh, harga cengkeh kering turun sampai Rp. 3000/kg. Tentu saja harga ini sangat rendah jika dibandingkan dengan biaya produksi panen.

Keuntungan yang dirasakan petani cengkeh terusik kembali, oleh ulah para tengkulak dan broker yang kerap kali menentukan harga beli cengkeh lebih rendah dari harga pasar. Dengan beragam alasan yang dikemukakan, pada akhirnya pihak tengkulaklah yang memiliki posisi daya tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan para petani cengkeh. Pada prinsipnya tawar-menawar dalam dunia perdagangan adalah hal yang biasa, namun untuk beberapa komoditi dan pada wilayah tertentu, seringkali proses tawar-menawar terjadi tidak secara seimbang. Maksudnya, para petani selalu menjadi pihak yang lebih dirugikan, bahkan seringkali penetapan harga jual, terlalu jauh dari harga pasar. Tidak menutup kemungkinan para petani lebih banyak menanggung rugi, sebab harga jual lebih rendah daripada modal kerja yang dibutuhkan, sehingga tidak mampu menutupi seluruh modal kerja yang telah dikeluarkan dalam pemeliharaan komoditas cengkeh.

Kabupaten Bulukumba, yang dikenal sebagai desa penghasil cengkeh merupakan wilayah pertanian yang cukup dikenal mampu menghasilkan bunga

cengkeh kualitas baik. Secara geografi dan klimatologi, lokasi kabupaten Bulukumba merupakan wilayah yang subur dan mudah diakses melalui darat dan laut. Sehingga kepopuleran cengkeh asal kabupaten Bulukumba telah melewati batas kabupaten dan propinsi Sulawesi selatan. Logikanya, para petani cengkeh di kabupaten Bulukumba dapat menikmati hasil perkebunan mereka secara layak sebagaimana hal yang sama dinikmati oleh para petani cengkeh di daerah lainnya di wilayah Republik Indonesia. Pertanian cengkeh merupakan warisan yang diturunkan dari para petani terdahulu.

Kehidupan pertanian yang telah lama dilakukan oleh para leluhur, tetap dipelihara sampai sekarang. Demikian halnya dengan para pedagang/ saudagar cengkeh, umumnya kegiatan usaha berdagang komoditas cengkeh, merupakan pekerjaan atau usaha keluarga.

Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan-perubahan juga mewarnai sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat kabupaten Bulukumba. Kekuatan pasar bebas telah merambah ke segala penjuru arah, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan secara umum, fenomena ini tidak mampu memberikan peluang yang lebih baik bagi para petani cengkeh dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui harga jual cengkeh yang sesuai dengan harga pasar dunia. Tidak jauh berbeda, pewarisan tanah pertanian kepada generasi yang lebih muda, tidak mampu membuat kualitas kehidupan petani cengkeh berubah secara perlahan. Kualitas pendidikan yang lebih baik selayaknya memberikan peluang yang lebih besar guna menaikkan derajat kehidupan petani cengkeh. Namun, pada saat yang bersamaan, regenerasi saudagar cengkeh juga dilakukan pada kurun

waktu yang bersamaan, sehingga proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dalam suatu lingkungan yang sama, pada akhirnya membuat nasib para petani, anak-anak mereka dan bahkan para cucu mereka tidak berubah secara drastis.

Hegemoni saudagar cengkeh terhadap para petani cengkeh, secara nyata tidak dapat diputuskan, sebagaimana diharapkan dari kalangan petani cengkeh. Ketergantungan yang terjadi, antara petani cengkeh kepada para saudagar cengkeh, tidak dapat dengan mudah dihilangkan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa ketergantungan dalam banyak dimensi, dianggap merupakan suatu fenomena yang lumrah atau natural. Orang kaya atau memiliki modal yang lebih menentukan segalanya, dibandingkan dengan orang yang tidak mampu/ tidak memiliki modal. Pada akhirnya, semua merasakan sudah berjalan sebagaimana mestinya, tidak perlu mengkritisi kondisi yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi sampai mempertanyakan harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Dan Perkebunan dalam pemberdayaan masyarakat petani cengkeh , dan dalam hal ini salah satu daerah yang menjadi sampel lokasi penelitian adalah Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi-Selatan dengan judul “ *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanaperan pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba?
- b. Faktor–faktor apa yang pendukung peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba?

## c. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- d. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba
- e. Untuk mengetahui faktor–faktor apa yang mendukung peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba

## C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah :

- f. Sebagai bahan analisis dan kajian peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba
- a. Sebagai bahan literatur untuk peneliti lain yang hendak meneliti objek yang sama.

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- g. Pemerintah mampu memahami faktor-faktor penghambat peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba
- h. Masyarakat bisa mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Peran Pemerintah

Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*” (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966, dalam Purwanto, 2003:54). Selain itu, Makmur (2001:227) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying given position in a social unit*”.

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Purwanto (2003:55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Purwanto (2003:56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Purwanto, 2003:58).

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about*

*appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas. (Suroso, 2007:19)

Scott et al. 1981 (dalam Progo, 2009:197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah samaseseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Nugroho (2003:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Robert Mac Iver ( 1960:5 ) *government is the organization of men under authority ...how man can be govern*. Maksudnya pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan menurut Woodrow Wilson (1924:9)

*government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of a community.*

Maksudnya pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan (Usman, 2003:8).

Pemerintahan bukanlah memberikan atau menciptakan petunjuk teknis untuk memerintah, tapi memberikan pemahaman dan arah tindakan bagaimana seharusnya melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar. Memahami tentang pemerintahan berarti kita tidak dapat melepaskan diri dari pemahaman organisasi, karena pemerintahan sendiri merupakan sekumpulan orang yang melakukan kerjasama yang didasarkan kepada rasionalitas, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Siagian, 2009:8)

Menurut Taliziduhu Ndraha (2008:18) pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Syafii (2011:6-7) membedakan secara tajam antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.

Selanjutnya, Syafii (2011:6-7) menyebutkan, bahwa suatu pengertian tentang pemerintahan, dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah “segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara”. Dalam arti sempit, adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif”.

Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada *Anglo Saxon* menurut Djohani (2003:3) lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, antara lain :

- a. Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan,
- b. Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislatif,
- c. Tanggung jawab pegawai peradilan biasa dan,
- d. Sifatnya lebih desentralistik.

C.F Strong (dalam Djohani ,2003:247) memberikan makna pemerintahan sebagai Pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara baik

kedalam maupun keluar. Untuk melaksanakan kewenangan itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain kekuatan di bidang militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kekuatan legislatif, atau pembuatan undang-undang serta kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara bagi penyelenggaraan peraturan. Semua kekuatan tersebut harus dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Sementara itu Finer dalam Syafii (2003:24-25) mengemukakan bahwa istilah “*government*” paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*).
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*).
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*).
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan negara menunjukkan adanya badan pemerintahan (*institutional*), kewenangan pemerintah (*authority*), cara memerintah (*technique to govern*), wilayah pemerintahan (*state, local, rural and urban*) dan sistem pemerintahan (*government system*) dalam menjalankan

fungsi pemerintahannya. Bayu Suryaningrat dalam Suroso (2007:2) bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan :

1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu yang member perintah dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah, dan
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sedangkan Rasyid dalam Suroso (2007:2) mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur (UU), mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat.

#### **B. Tugas dan Fungsi Pemerintah**

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlakusebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama,

menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat (Taliziduhu, 2011:89) .

Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat (Malinowski dalam Sarwono, 1991:55). Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau (terjemahan Sarwono, 1991:15) adalah konflik kontrak sosial (*social contract*). Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan yakni sebagai berikut :

**a. Fasilitator**

Memfasilitasi berasal dari kata, bahasa Inggris "Facilitation" yang mempunyai arti "membuat sesuatu menjadi mudah". Secara umum pengertian "facilitation" (fasilitasi) dapat diartikan sebagai suatu proses "mempermudah" sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu sedangkan orang yang "mempermudah" disebut dengan "Fasilitator" (Pemandu).

**b. Nilai-nilai penting dalam memfasilitasi**

1. Demokrasi

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam proses dimana dia menjadi peserta tanpa prasangka; perencanaan untuk pertemuan apa saja terbuka luas dan dilakukan secara bersama-sama oleh fasilitator dan para peserta; agenda dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta dan terbuka terhadap perubahan-perubahan para peserta; dan untuk jangka

waktu selama fasilitator bekerja dengan mereka itu, tidak ada struktur organisasi secara hirarkis yang berfungsi.

## 2. Tanggung Jawab

Sebagai fasilitator, bertanggungjawab terhadap rencana yang sudah dibuat, apa yang dilakukan, dan bagaimana hal ini membawa pengaruh pada isi, partisipasi dan proses pada pembahasan itu. Fasilitator juga bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan apa yang terjadi pada fasilitator. Fasilitator harus sensitif terhadap bagaimana dan seberapa besar para peserta bersedia dan mampu memikul tanggungjawab pada setiap pertemuan. Melalui pengalaman, para peserta dapat belajar memikul tanggungjawab yang semakin besar.

## 3. Kerjasama

Fasilitator dan para peserta bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama mereka. Orang mungkin akan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok. Sedangkan fasilitasi / memandu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bersama dengan sebuah kelompok.

## 4. Kejujuran

Fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan, keprihatinan dan prioritas dalam bekerja bersama seluruh peserta pelatihan, dan fasilitator seharusnya menentukan suasana bagi suatu harapan akan kejujuran dari seluruh peserta. Ini juga berarti bahwa fasilitator harus jujur dengan dan terhadap peserta dan terhadap dirinya sendiri menyangkut apa saja yang menjadi kemampuan fasilitator. Fasilitator harus mewakili dirinya sendiri secara adil dan

tidak berusaha untuk berbuat terlalu jauh melampaui kemampuannya sendiri dalam peranan sebagai fasilitator.

#### 5. Kesamaan Derajat

Setiap anggota mempunyai sesuatu yang dapat disumbangkan pada peserta pelatihan dan perlu diberikan kesempatan yang adil untuk melakukan hal itu; Fasilitator menyadari bahwa dia dapat belajar dari para peserta sebesar apa yang mereka bisa pelajari dari fasilitator.

Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat atau pendapat. Fasilitator haruslah menjadi sumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

Rewansyah (2011:37-51) mengungkapkan bahwa Secara umum pemerintah memiliki lima fungsi/peranan utama (*main function*) eksekutif (pemerintah) yaitu :

##### a. Fungsi Pengaturan/Regulasi

Fungsi pengaturan/regulasi (penetapan kebijakan publik/negara) adalah fungsi yang tidak dapat didelegasikan, dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di luar pemerintahan. Kebijakan tersebut dapat berupa tertulis dan tidak tertulis, kebijakan – kebijakan pemerintahan Negara perlu dirumuskan secara tertulis dengan mengikuti suatu “*national legal drafting system and proses*” dan dituangkan dalam aturan perundang-undangan yang tepat sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta

jasas keterkaitan dan kesesuaiannya satu sama lain, dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pemegang kedaulatan rakyat.

2. Fungsi pelayanan kepada masyarakat

Menurut Ryass Rasyid dalam buku makna pemerintahan : Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan (dalam Rivai 2010:27), ada tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*Empowerment*), dan pembangunan (*Development*). Fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi.

3. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial warga masyarakat dalam arti : Semakin tinggi taraf hidup warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar (*bargaining position*) dan semakin integrative masyarakat. Pemberdayaan terus menerus, komperhensif, dan stimulansampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan warga masyarakat.

4. Fungsi Pengelolaan Aset/Kekayaan Negara

Aset atau kekayaan Negara adalah tak lain merupakan sumber daya yang terdapat di bumi Indonesia yang merupakan milik Negara Indonesia yang dikelola/diurus oleh pemerintah. Sumber daya alam dewasa ini sudah menjadi komoditas politik baik di dalam maupun ke luar. Menurut Fahmi (2011:113). Pengelolaan sumber daya adalah penataan barang-barang, baik yang mempunyai manfaat lebih dari setahun (inventaris) maupun

barangpakai habis yang diperoleh melalui tahapan: perencanaan, pengadaan, penerimaan/penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan/pelelangan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

#### 5. Fungsi Keamanan, Ketertiban, Pengamanan dan Perlindungan (Polisional)

Fungsi pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, dan pengamanan serta perlindungan sudah termasuk dan terkait dengan fungsi pemerintah di bidang perumusan kebijakan (pengaturan), pelayanan, pemberdayaan, dan fungsi pengelolaan asset/kekayaan Negara. Misalnya, fungsi keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas aparaturnya kepolisian yang dapat juga dirumuskan sebagai fungsi pelayanan keamanan dan ketertiban umum kepolisian.

#### C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah. Pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, istilah /kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003:34).

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses

pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri.

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Menurut Sukino (2013:84) Paradigma baru pembangunan di daerah adalah pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk petani dan buruh tani, melalui penyediaan fasilitas dan prasarana publik, pengembangan system agribisnis, industry kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan IPTEK guna memanfaatkan potensi keunggulan sumber daya alam.

Permasalahan utama pemberdayaan masyarakat pertanian di tinjau dari aspek ekonomi adalah :

1. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi-pertanian yang mampu menciptakan kesempatan bagi masyarakat pertanian untuk mengembangkan usaha agribisnis yang kompetitif.
2. Lemahnya kemampuan masyarakat petani untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.

Ditinjau dari aspek sosial, permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat pertanian adalah :

1. Kurangnya upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial-budaya yang mendukung masyarakat kepada kondisi ketertinggalan.
2. Lemahnya akses masyarakat untuk memperoleh tambahan pengetahuan, keterampilan, dan informasi bisnis.
3. Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial secara adil.

Tantangan utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat pertanian adalah bagaimana membangun kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan kerja dan pendapatan yang lebih layak.

Secara khusus untuk memberdayakan ekonomi masyarakat tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki iklim ekonomi makro dan kegiatan ekonomi riil yang kondusif yang dapat menjamin kegiatan usaha ekonomi masyarakat lebih kompetitif dan menguntungkan. Hal ini erat dengan upaya untuk memberikan akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi, pengembangan organisasi ekonomi yang dikuasai oleh pelaku ekonomi kecil, dan meningkatkan fasilitas bantuan teknis dan pemihakan bagi usaha masyarakat kecil.

Dengan melihat permasalahan dan tantangan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat, strategi kebijakan yang di ambil adalah (Fahmi, 2011:12).:

1. Membangun kelembagaan sosial-ekonomimasyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya.
2. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi-produktif secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak.
3. Meningkatkan upaya pemihakan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi, pengembangan sektor ekonomi riil.
4. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Sehubungan dengan perihal di atas, paradigma pembangunan pertanian adalah pertanian berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan manusia dan masyarakat. Paradigma pembangunan pertanian bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya dengan kemampuan sendiri.

Pembangunan pertanian perlu dirumuskan sejalan dengan paradigma baru pembangunan pertanian tersebut, yaitu peningkatan kualitas dan profesionalitas sumberdaya manusia tani sebagai pelaku aktif pembangunan pertanian terpadu. Pembangunan pertanian untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi maju yang murah, sederhana, dan efektif disertai penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian di perdesaan. Pembangunan pertanian dengan paradigma baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat

yang akan menjadi pendorong pertumbuhan sektor non-pertanian. Keterkaitan sektor pertanian dan non-pertanian akan semakin cepat terjadi bila tersedia prasarana ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi pertanian di pedesaan.

Pembangunan pertanian terpadu patut mengedapankan potensi kawasan dan kemampuan masyarakatnya. Keunggulan komparatif yang berupa sumberdaya alam perlu diiringi dengan peningkatan keunggulan kompetitif yang diwujudkan melalui penciptaan sumberdaya manusia dan masyarakat pertanian yang semakin profesional. Masyarakat tani, terutama masyarakat tani tertinggal sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat, perlu terus dibina dan didampingi sebagai manusia tani yang semakin maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Sumberdaya alam dan manusia patut menjadi dasar bagi pengembangan pertanian masa depan. Dengan demikian, perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan pembangunan pertanian yang mengarah pada peningkatan kemampuan dan profesionalitas petani dan masyarakat pertanian untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan lestari dengan memanfaatkan rekayasa teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas petyanian, pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat perdesaan serta menghapus ketertinggalan.

Arah pembangunan pertanian menurut paradigm baru ini dapat diwujudkan terutama melalui upaya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pertanian dilakukan sesuai dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhannya. Sejalan dengan arah pembangunan pertanian ini, peran pemerintah adalah mempertajam program-program pembangunan untuk masyarakat melalui penguatan kelembagaan pembangunan, baik kelembagaan

masyarakat tani maupun kelembagaan birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui pembangunan partisipatif untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, dan berkembangnya kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan sektor pertanian sangat strategis bagi pembangunan daerah. Posisi ini sepatutnya menjadi pendorong bagi sektor pertanian untuk melakukan evaluasi kembali tentang peran strategisnya. Sebagai antisipasi maka perlu dimiliki komitmen untuk melaksanakan arah baru pembangunan pertanian, pembangunan yang berorientasi pada manusia berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya, serta daya dukung lokal, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Salah satu usaha peningkatan produksi pertanian selain ekstensifikasi dan rehabilitasi adalah intensifikasi. Intensifikasi adalah usaha peningkatan produksi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berada di dalam sistem pertanian. Menurut Suroso (2007:29) intensifikasi yaitu usaha peningkatan produksi pangan dengan cara-cara yang intensif pada lahan yang sudah ada, antara lain dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien. Pada usaha tani cengkeh optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dapat dilakukan salah satunya melalui alokasi irigasi secara efektif dan efisien (Rahman, 2008:75-76).

#### D. Tinjauan tentang pertanian

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Negeri Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita.

Sejalan dengan peningkatan peradaban manusia, pertanianpun berkembang menjadi berbagai sistem. Mulai dari sistem yang paling sederhana sampai sistem yang canggih dan padat modal. Berbagai teknologi pertanian dikembangkan guna mencapai produktivitas yang diinginkan.

Kemajuan ilmu dan teknologi, peningkatan kebutuhan hidup manusia, memaksa manusia untuk memacu produktifitas menguras lahan, sementara itu daya dukung lingkungan mempunyai ambang batas toleransi. Sehingga, peningkatan produktivitas akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang pada ujungnya akan merugikan manusia juga. Berangkat dari kesadaran itu maka muncullah tuntutan adanya sistem pertanian berkelanjutan.

Bentuk-Bentuk Pertanian Di Indonesia :

1. Sawah
2. Tegalan
3. Pekarangan
4. Ladang Berpindah

Beberapa hasil-hasil pertanian di Indonesia : pertanian tanaman pangan, seperti : Padi, Jagung, Kedelai Kacang Tanah, Ubi Jalar, Ketela Pohon.

Sedangkan, Pertanian Tanaman Perdagangan meliputi : Kopi, Teh, Kelapa, Karet, Kina, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Kelapa Sawit, Tebu(Haryanti,2005:68-69).

### **1. Tinjauan tentang pembangunan pertanian**

Pembangunan pertanian di Indonesia dilaksanakan secara terencana dimulai sejak Repelita I (1 April 1969), yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru, yang tertuang dalam strategi besar pembangunan nasional berupa Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PU-PJP) yaitu PU-PJP I (1969-1994) dan PU-PJP II (1994-2019). Dalam PU-PJP I, pembangunan dilaksanakan melalui lima serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang semuanya dititik beratkan pada sektor pertanian sebagai berikut:

1. Repelita I: titik berat pada sektor pertanian dan industri pendukung sector pertanian.
2. Repelita II: titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industry pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
3. Repelita III: titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
4. Repelita IV: titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.
5. Repelita V: melanjutkan Repelita IV.

Pembangunan pertanian merupakan sebuah program dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia sehingga nantinya masyarakat dapat memiliki sebuah kemandirian dari sisi ekonomi hingga sosial politik di lingkungannya. Jadi

pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi lebih baik (Rahman, (2008:4). Dengan begitupun proses pemerintahan akan lebih memberikan pelayanan yang efektif dikarenakan adanya sebuah partisipasi aktif dari masyarakat karena adanya suatu kesadaran untuk berkontribusi dalam pemerintahan khususnya di daerah.

Menurut Rahman (2008:21) di banyak negara, sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Para perancang pembangunan Indonesia pada awal masa pemerintahan Orde Baru menyadari benar hal tersebut, sehingga pembangunan jangka panjang dirancang secara bertahap. Pada tahap pertama, pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri penghasil sarana produksi pertanian. Pada tahap kedua, pembangunan dititikberatkan pada industri pengolahan penunjang pertanian (agroindustri) yang selanjutnya secara bertahap dialihkan pada pembangunan industri mesin dan logam.

Kebijakan untuk menetapkan sektor pertanian sebagai titik berat pembangunan ekonomi sesuai dengan rekomendasi Rostow dalam rangka persiapan tinggal landas. Lebih lanjut dinyatakan bahwa revolusi pertanian merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan upaya menciptakan prakondisi tinggal landas.

Menurut Rahman (2008:33) tidak berkembangnya sektor pertanian berakar pada terlalu berpihaknya pemerintah pada sektor industri sejak pertengahan tahun 1980-an. Menyusul periode pertumbuhan tinggi sektor pertanian satu dekade

sebelumnya, pemerintah seolah menganggap pembangunan pertanian dapat bergulir dengan sendirinya. Asumsi ini membuat pemerintah mengacuhkan pertanian dalam strategi pembangunannya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh paradigma pembangunan saat itu yang menekankan industrialisasi. Pemerintah mencurahkan perhatiannya pada sektor industri, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan proteksi yang sistematis. Akibatnya, proteksi besar-besaran ini telah merapuhkan basis pertanian pada tingkat petani.

Definisi pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*).

Dalam literatur klasik pembangunan pertanian karya Arthur Mosher yang berjudul "*Getting Agriculture Moving*" dijelaskan secara sederhana dan gamblang tentang syarat pokok dan syarat pelancar dalam pembangunan pertanian.

Syarat pokok pembangunan pertanian meliputi:

- (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani,
- (2) teknologi yang senantiasa berkembang,
- (3) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal,
- (4) adanya perangsang produksi bagi petani, dan
- (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Adapun syarat pelancar pembangunan pertanian meliputi:

- (1) pendidikan pembangunan,
- (2) kredit produksi,
- (3) kegiatan gotong royong petani,
- (4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan
- (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian (Haryanti,2005:43-44).

## **2. Tinjauan Tentang Pertanian Cengkeh di Kabupaten Bulukumba**

Kabupaten Bulukumba terletak di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, karena wilayah ini terletak di balik perbukitan. Kondisi geografis tersebut membuat kabupaten Bulukumba sangat cocok untuk pengembangan tanaman hortikultura, seperti kopi, cengkeh, coklat, dan vanili. Desa Bengkel yang terdiri atas sembilan banjar adat sejak dahulu terkenal sebagai sentra penghasil kopi. Sekitar tahun 1980-an terjadi penurunan harga kopi yang sangat drastis di pasaran. Anjloknya harga kopi tersebut membuat para petani di Desa tersebut memikirkan untuk menanam tanaman komoditi lainnya yang lebih menjanjikan. Di satu sisi kalau mereka menanam tanaman lain belum tahu juga apakah hasilnya akan lebih baik, karena mereka tahu bahwa tanaman cengkeh adalah merupakan tanaman yang paling subur tumbuh di daerahnya. Akan tetapi petani malas untuk memetik bunga cengkehnya itu disebabkan karena kekawatiran setelah bersusah-susah memanjat pohon dan membayar ongkos petik, setelah dijual harganya tak sebanding dengan ongkos produksinya.

Tanaman cengkeh sebenarnya telah berkembang di wilayah kota Palopo serta kabupaten Luwu dan telah menjadi pilihan untuk dikembangkan di kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan harga komoditi ini sangat

menjanjikan. Banyak para petani yang mencari bibit tanaman cengkeh. Pada tahun 1981 sampai dengan 1985 terjadi perabasan pohon kopi secara besar-besaran dan diganti dengan tanaman cengkeh. Sepuluh tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1991 petani cengkeh di kabupaten Bulukumba menikmati jerih payahnya sekitar tujuh sampai sepuluh tahun telah bercocok tanam cengkeh. Akan tetapi, kegembiraan yang dialami oleh petani cengkeh di Desa tersebut tidak berlangsung lama, oleh karena terjadi penurunan harga jual yang sangat drastis seiring dengan kebijakan Badan Penyangga Penjualan Cengkeh (BPPC) memonopoli pembelian cengkeh petani. Harga jual cengkeh menjadi sangat murah, yaitu dari harga jual rata-rata

Rp 15.000,- sampai dengan Rp 25.000,- anjlok sampai Rp 3000,- per kilogramnya.

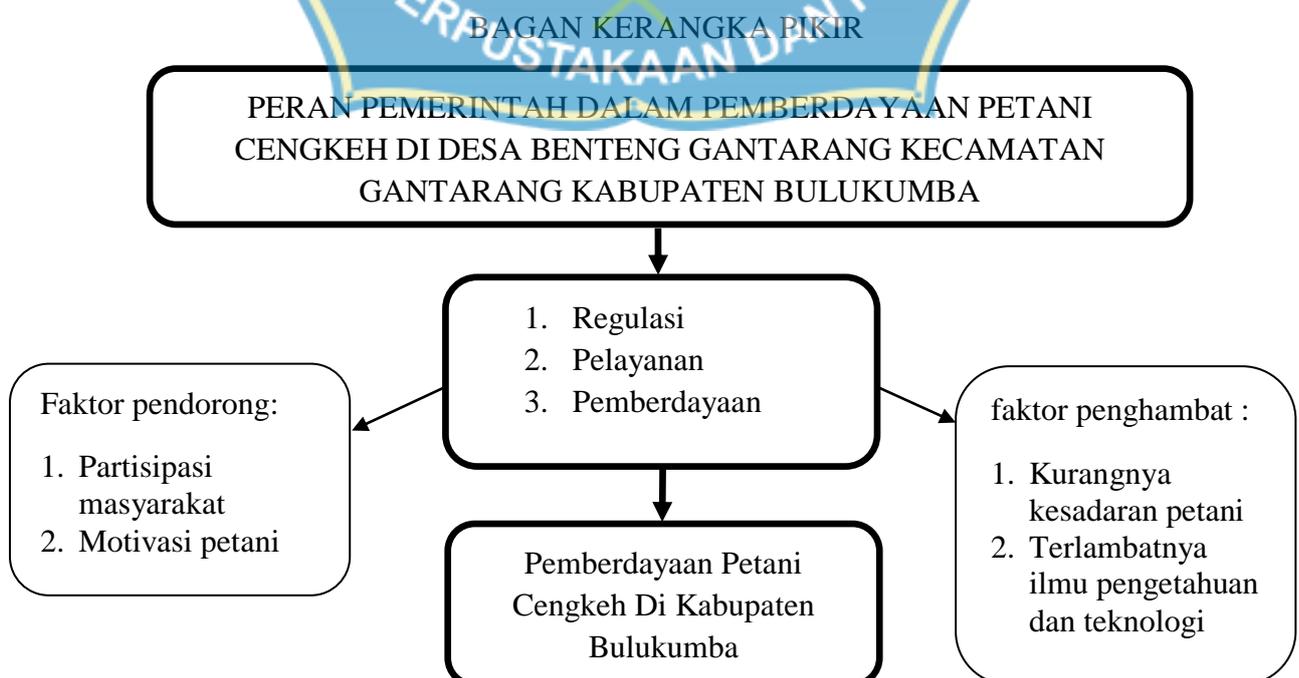
Anjloknya harga cengkeh tersebut membuat petani menjadi frustrasi. Mereka membiarkan pohon cengkehnya tanpa perawatan, seperti pembersihan ladang, pemupukan, dan penyiraman. Hal ini terjadi oleh karena harga cengkeh yang sangat rendah dan tidak sepadan dengan biaya produksinya. Tanaman cengkeh tumbuh dengan tanpa perawatan dari petani menyebabkan tanaman cengkeh menjadi tidak subur. Setelah bergulirnya reformasi dan sampai pada pembubaran BPPC harga jual cengkeh di pasaran berangsur-angsur menjadi baik kembali. Petani cengkeh kembali bergairah untuk merawat tanaman cengkehnya yang sebelumnya ditinggalkan begitu saja. Para petani tersebut rata-rata memiliki lahan seluas 15 sampai dengan 30 are dengan jumlah tanaman cengkeh sebanyak 25 sampai dengan 50 buah pohon cengkeh. Dari jumlah ini para petani rata-rata

pertahunnya memanen cengkeh sebanyak 250 kg sampai dengan 500 kg cengkeh kering. Sampai dengan bulan Agustus 2010 harga cengkeh kering per kilogramnya adalah rata-rata Rp 50.000,-.

### E. Kerangka Pikir

Peningkatan taraf hidup masyarakat tak lepas dari peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani di Bulukumba khususnya petani cengkeh sangat penting. Salah satunya memberikan pelatihan dan memberikan bibit unggul agar dapat meningkatkan daya jual hasil pertanian hingga regulasi atau aturan yang memihak pada petani, kegiatan-kegiatan ini bisa terlaksana jika didukung oleh partisipasi masyarakat. Namun peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba di pengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu di perhatikan, yang terdiri dari faktor pendorong dan faktor penghambat.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk lebih jelasnya ini terdapat kerangka konsep yang menjadi landasan pemikiran sebagai berikut :



## F. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang di maksud dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukkumba, bantuan-bantuan yang di berikan oleh pemerintah untuk membudidayakan masyarkat petani dalam pemberdayaan masyarakat petani cengkeh. Untuk itu dalam karya tulis ini penulis memberikan batasan penelitian, dan Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bulukumba maka fokus penelitian sebagai berikut:

- (1) Peran pemerintah adalah keterlibatan seorang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk meningkatkan apa yang menjadi tugasnya
- (2) Regulasi adalah peran pemerintah dalam hal merumuskan kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh di kabupaten Bulukumba
- (3) Pelayanan adalah peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan para petani cengkeh dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan di kabupaten Bulukumba
- (4) Pemberdayaan adalah peran pemerintah dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan membantu para petani cengkeh agar lebih professional dan berdaya saing dari aspek soial-ekonomi
- (5) Faktor-faktor pendorong yaitu faktor yang menjadi motivasi di laksanakan nya kegiatan pemberdayaan. Adapun beberapa faktor pendorong pemberdayaan yaitu a. motivasi petani, b. partisipasi masyarakat.

- (6) Faktor penghambat adalah pemicu terhambatnya kegiatan pemberdayaan adapun beberapa faktor penghambat pemberdayaan yaitu : a. Kurangnya kesadaran petani, b. Terlambatnya ilmu pengetahuan dan teknologi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumbas selama kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan juni sampai dengan bulan juli 2016. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan di kabupaten Bulukumba masih banyak petani cengkeh yang belum merasakan peran pemerintah dalam meningkatkan produktifitas serta kesejahteraan para petani cengkeh.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

### C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

#### A. Data Primer

Yakni data dan informasi yang langsung dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara.

#### B. Data Sekunder

Yakni data dan informasi yang mendukung data primer, yang diperoleh lewat dokumen ataupun data yang tersimpan di website yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan dalam kegiatan privatisasi ini yakni :

Table 1. Informan Mengenai Permasalahan Yang Diteliti:

No.	Informan	Jumlah
1	Penyuluh	3
2	Kepala bidang	1
3	Masyarakat petani cengkeh	6
<b>Total</b>		<b>10</b>

## E. Tehnik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan informan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu masalah tertentu, Esterberg dalam (Sugiyono, 2012 : 73 ). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan percakapan yang mendalam terhadap masalah tertentu dengan para informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat, sehingga pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

### 2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno dalam (Sugiyono 166: 2003). Dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi tidak terstruktur dimana dalam pengamatan tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam website.

## F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan instrument selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012 : 91) ketiga komponen tersebut yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

### 2. Sajian Data

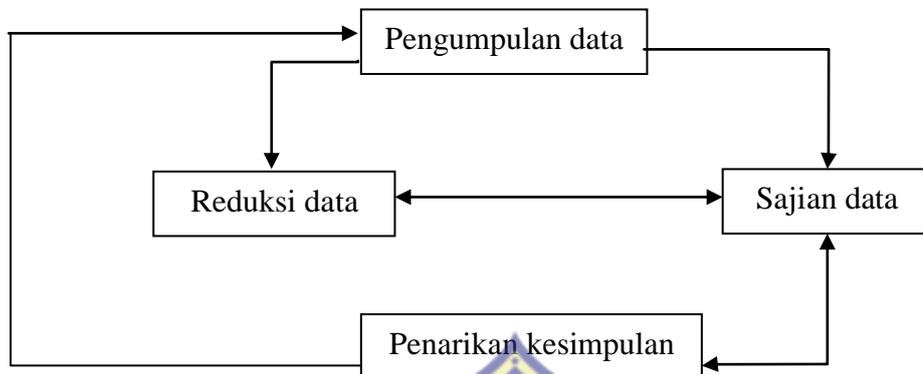
Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

### Model Analisis Interaktif

(Sumber : Sugiyono, 2012)



Gambar 2. Model Analisis Interaktif

### G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

#### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

#### b. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratannya.

#### c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Monografi Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba berada di 153 Km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 km<sup>2</sup> atau 1,85% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak diantara 05°20' - 05°40' LS dan 119°58' - 120°28' BT dengan batas-batas yakni: - Sebelah utara berbatasan Kabupaten Sinjai; - Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar - Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores; - Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng; Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 7 diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu kecamatan: Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. Kabupaten Bulukumba juga mempunyai 2 (dua) buah pulau yang terdapat pada wilayah Desa Bira Kecamatan Bontobahari yakni Pulau Liukang Loe (berpenghuni) dan Pulau Kambing (tidak

berpenghuni). Secara keseluruhan panjang garis pantai 128 km dengan luas laut +204,83 km<sup>2</sup> sangat menunjang Kabupaten Bulukumba sebagai daerah bahari/maritim dengan potensi unggulan perikanan dan kelautan. Dari 10 kecamatan yang ada, semua dapat ditempuh dengan mudah dan ditunjang dengan infrastruktur jalan kabupaten yang memadai. Kecamatan yang terjauh dari ibukota kabupaten yakni Kecamatan Kajang.

Kabupaten Bulukumba mempunyai wilayah administrasi yang terdiri dari beberapa kecamatan, desa, kelurahan, dusun dan lingkungan. Dapat kita lihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun Yang Ada Di Kabupaten Bulukumba.

No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Kelurahan	Lingkungan	Dusun
1	Ganatarang	Ponre	18	3	8	80
2	Ujung bulu	Bulukumba		9	31	-
3	Ujung loe	Ujung loe	12	1	4	42
4	Bontobahari	Tanah baru	4	4	13	13
5	Bontotiro	Hila-hila	12	1	5	46
6	Herlang	Tanuntung	6	2	10	28
7	Kajang	Kassi	17	2	11	100
8	Bulukumpa	Tanete	14	3	7	76
9	Rilau ale	Palampang	14	1	5	57
10	Kindang	Brg rappoa	12	1	3	47
Jumlah			109	27	97	489

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa-2013.

Kabupaten Bulukumba mempunyai wilayah administrasi yang terdiri dari 10 kecamatan dan 136 desa/kelurahan yang terdiri dari 109 desa dan 27 kelurahan, terdapat 18 desa/kelurahan swadaya, 16 desa/kelurahan swakarya dan 102 desa/kelurahan yang swasembada. Artinya dari 136 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Bulukumba 75% sudah berkualifikasi mandiri.

## 2. Iklim

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan dengan klasifikasi iklim lembab atau agak basah. Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Battakaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulu-bulu dan stasiun Herlang.

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba cukup tinggi rata-rata di atas 1000 mm per tahun dengan rata-rata hujan 12 hari per bulan dengan bagian wilayah sebagai berikut:

1. Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari.
2. Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.
3. Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang,

sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.

4. Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

### 3. Topografi Wilayah

Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki topografi yang bervariasi dari 0 meter hingga di atas 1000 meter dari permukaan laut (dpl) yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) satuan ruang morfologi yaitu:

1. Morfologi Daratan Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s.d. 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.
2. Morfologi Bergelombang Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s.d. 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.
3. Morfologi Perbukitan Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s.d. di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Ketinggian Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah Latosol dan Mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah Alluvial Hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat Zpasir terdapat di pesisir pantai dan sebagian di dataran bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

#### 4. **Karakteristik Obyek Penelitian**

##### 1. **Jumlah Penduduk**

Pertumbuhan penduduk menjadi prioritas pemerintah saat ini terkait dengan adanya hubungan yang linier antara pertumbuhan penduduk dengan angka kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan penduduk menjadi modal dalam faktor produksi dan semakin bertambahnya akan semakin meningkatkan output, maka kondisi ini menandakan bahwa penduduk memiliki kedudukan sebagai asset. Namun sebaliknya, ketika pertumbuhan penduduk akan semakin menurunkan daya beli individu, maka dikatakan penduduk sebagai beban. Hal inilah yang menjadi perhatian baik di daerah maupun ditingkat pusat. Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel 3 berikut

Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bulukumba

No	kecamatan	2011 (jiwa)	2012 (jiwa)	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
1.	Gantarang	70.301	71.158	71.741	72.143	72.891
2.	Ujung Bulu	43.161	39.533	48.518	48.816	49.298
3.	Ujung Loe	37.722	23.976	39.859	40.105	40.498
4.	Bonto Bahari	23.774	22.808	24.180	24.328	24.561
5.	Bonto Tiro	25.580	24.128	23.004	23.146	23.365
6.	Herlang	24.786	47.080	24.332	24.281	24.717
7.	Kajang	46.405	50.835	47.467	47.764	48.227
8.	Bulukumpa	56.354	37.809	51.525	51.568	52.073
9.	Rilau Ale	35.657	29.815	38.121	38.358	38.730
10.	Kindang	31.006	21.211	30.057	30.241	30.742
<b>Jumlah</b>		<b>394.746</b>	<b>395.268</b>	<b>398.531</b>	<b>400.990</b>	<b>404.900</b>

Sumber : Badan Pusat Statistic Kab Bulukumba 201

Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2012 yakni 395.268 jiwa per km<sup>2</sup> mengalami peningkatan 0,97% dari tahun 2013. Kecamatan Gantarang mempunyai kepadatan yang tinggi dikarenakan sebagai ibukota kabupaten dan aktivitas yang tinggi dengan jumlah penduduk yang besar dan luas daerah relatif kecil jika dibandingkan kecamatan lainnya.

Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2013 berjumlah 398.531 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. Dari 10 (sepuluh) Kecamatan, Kecamatan Gantarang yang mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 71.741 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk

laki-laki yaitu 211.092 jiwa perempuan sedangkan 187.439 jiwa laki-laki. Dengan demikian rasio jenis kelamin (perbandingan laki-laki dengan perempuan) adalah 89, yang berarti dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 89 orang penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2011 yaitu 345 orang per km<sup>2</sup> yang berarti lebih tinggi 3 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Ujung Bulu yaitu 3.360 orang per km<sup>2</sup>. Hal ini terjadi karena Kecamatan tersebut merupakan ibu kota Kabupaten Bulukumba.

## **2. Sumber Mata Pencarian**

Mata pencarian penduduk Kabupaten Bulukumba bergerak pada beberapa jenis kegiatan seperti pada sektor pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sebagian besar penduduk bergerak pada sektor pertanian dan nelayan, sedangkan selebihnya berprofesi pada kegiatan perkebunan, perdagangan, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pertambangan, angkutan, bangunan dan lain sebagainya hal ini disebabkan oleh potensi lahan yang cukup subur dan ditunjang oleh prasarana penunjang seperti jaringan irigasi dan industri pengolahan hasil pertanian lainnya. Sedangkan penduduk lainnya yang tidak bekerja merupakan ibu rumah tangga dan penduduk usia sekolah, dan selebihnya merupakan pencari kerja atau penduduk yang belum memperoleh pekerjaan.

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah di wilayah Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan andalan, yang memberikan kontribusi dalam mempekokoh Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional. Tanaman pangan yang sangat potensial yakni tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama

masyarakat, terdapat pula tanaman bahan pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang ijo, dan kedelai, yang merupakan tanaman sela atau tanaman antara yang ditanam oleh petani setelah sekali/dua kali panen tanaman padi, khususnya di lokasi lahan persawahan sedangkan pada lokasi lahan non persawahan tanaman tersebut diantaranya merupakan tanaman utama.

### **3. Tingkat Pendidikan**

Pada tahun 2012-2013 menurut BPS Kabupaten Bulukumba, jumlah pendidikan setingkat SD/MI sekitar 378 sekolah, untuk SMP/MTs sebanyak 378 sekolah, dan untuk tingkat SMA/SMK/MA, sekitar 54 sekolah. Yang tersebar di sepuluh kecamatan se-kabupaten Bulukumba. Pada dasarnya nama-nama tiap sekolah di kabupaten Bulukumba cenderung mengikuti nama daerah untuk mempermudah mengidentifikasi asal sekolah, namun pada tahun 2012 semua nama sekolah khusus SMP, SMA, di kab. Bulukumba berubah tidak lagi mengikuti nama daerah tempat berdomisili namun mengikuti nama kabupaten, serta nomor urut sekolah pun berubah berdasarkan umur berdirinya.

### **4. Profil Petani Cengkeh Di Bulukumba**

Dari beberapa komoditas lainnya yang dihasilkan seperti kakao, kelapa, karet, pala, karet, dan lada, hasil produksi yang paling besar produksinya adalah cengkeh. Itu sebabnya, sebagian besar masyarakat sekitar memiliki mata pencaharian sebagai petani cengkeh, di samping menjadi peternak ataupun menanam hasil bumi lainnya. Saat ini lebih dari 6.000 ha lahan cengkeh di Bulukumba yang tersebar di sembilan kecamatan. Petani cengkeh di tempat ini hampir mencapai 10.000 orang dengan total produksi pada tahun 2014 sebanyak

800 ton. Hampir setiap kepala keluarga paling tidak memiliki 1 ha lahan perkebunan cengkeh. Dari sembilan kecamatan yang menanam cengkeh, produksi paling tinggi berada di Kecamatan Kindang dengan hasil produksi cengkeh 50 ton tiap sekali panen, disusul dengan Kecamatan Gantarang dengan hasil produksi 30 ton per panen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4: Luas Areal, Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Cengkeh Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 – 2014.**

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (Kk)
1	Gantarang	1.186	279	1.438
2	Ujungbulu	-	-	-
3	Ujung Loe	332	5	16
4	Bontobahari	-	-	-
5	Bontotiro	36	-	5
6	Herlang	20	1	17
7	Kajang	101	10	206
8	Bulukumpa	1.495	388	1.547
9	Rilau Ale	887	189,5	1.975
10	Kindang	2.126	490,5	4.433
<b>Bulukumba</b>	<b>2014</b>	<b>6.183</b>	<b>1.363,00</b>	<b>9.637</b>
	2013	5.162	718	9.085
	2012	5.080	857,9	9.085
	2011	4.775	60,4	9.030
	2010	4.648	340,1	9.010

Sumber : Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2014

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa area untuk tanaman cengkeh yang terluas di kabupaten bulukumba berada di kecamatan kindang yaitu sekitar 2.126 ha dengan jumlah produksi 490,5 ton dari 4.433 petani yang ada di kecamatan kindang. Sedangkan di kecamatan ujung bulu dan kecamatan bontobahari tidak terdapat tanaman cengkeh.

Di Kabupaten Bulukumba terdapat banyak petani cengkeh yaitu sekitar 9.637 petani cengkeh, namun dalam penelitian ini hanya mengambil sampel 6 orang petani cengkeh sebagai responden. Secara rinci dapat dilihat identitas responden petani cengkeh di Bulukumba pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Identitas Responden petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukkumba

N o	Nama	Umur (Thn)	Pendidikan	Luas Jahan (Ha)	Pengalaman (Thn)	Jumlah tanggung an
1	H. Citta	43	SMA	2	15	1
2	H. Palle	49	SD	2	16	2
3	H. Rasan	53	SMP	2	13	2
4	H. Lahami	55	SMA	1	10	3
5	H. Sahakan	67	SD	3	20	4
6	Samsul	36	SD	2	16	2
<b>Jumlah</b>				<b>12</b>	<b>90</b>	<b>14</b>

Sumber : Hasil Wawancara Langsung

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa petani yang paling lama menanam cengkeh adalah bapak Hj.Sahakan yang sudah 20 tahun menanam

cengkeh dengan mengenyam tingkat pendidikan sampai SD saja, beliau memiliki luas lahan sekitar 3 Ha.

## **B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba**

Pemberian subsidi kepada petani merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah dengan cakupan dan besaran yang berubah dari waktu ke waktu. Pemberian insentif tidak saja didasarkan oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga karena desakan dan dorongan politik dan sosial. Bisa terjadi, pemberian subsidi dan dukungan harga bagi petani lebih didominasi oleh pertimbangan politik dan sosial. Sebagai contoh, berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penggunaan pupuk pada usahatani sawah telah berlebihan sehingga pemberian subsidi harga pupuk yang terus meningkat merupakan kebijakan yang tidak tepat dipandang dari pertimbangan ekonomi. Namun demikian, pemberian subsidi pupuk yang terus meningkat mendapatkan dukungan politik dari parlemen maupun masyarakat luas karena dipandang bijaksana menolong petani yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Ada dua argumentasi yang melandasi pentingnya pemerintah yaitu:

- Pertama, suatu kewajiban pemerintah membantu petani yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengembangkan kapasitas produksi pertanian sementara eksistensi produksi pertanian ke depan masih sangat diperlukan;
- Kedua, melindungi petani miskin dari ancaman eksternal akibat ketidakadilan

perdagangan dalam rangka memberdayakan mereka menjadi masyarakat yang mandiri mampu menghidupi dirinya dan juga menjaga eksistensi sektor pertanian ke depan.

Perkebunan Kabupaten Bulukumba menyusun berbagai konsep dan strategi yang berhubungan dengan pertanian, petani sama dengan kondisi pangan di Indonesia. Visi dari Departemen Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Kehutanan Dan Pertanian sendiri adalah “Terwujudnya pertanian tangguh untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian khususnya cengkeh peserta peningkatan kesejahteraan petani”. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani antara lain :

1. Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), yang merupakan skim kredit atau pembiayaan yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Bulukumba dengan Bank Pelaksana SP3 khusus untuk pembiayaan petani yang mempunyai kendala dalam hal kekurangan anggaran.
2. Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani), yang dilaksanakan secara partisipatif oleh semua pemangku kepentingan ( stake holder) pembangunan pertanian, dalam bentuk laboratorium agribisnis.
3. Poor Farmers Income Improvement Trough Innovation Project (PFIITIP), yaitu Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi, dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan/pendapatan petani miskin melalui inovasi

pertanian mulai dari tahap produksi sampai pemasaran hasil. Untuk itu diperlukan peningkatan akses petani terhadap informasi pertanian, dukungan pengembangan inovasi pertanian, serta upaya pemberdayaan petani. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan, pengembangan kelembagaan serta perbaikan sarana/prasarana yang dibutuhkan di desa, merupakan alternatif dalam pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuan inovasi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah bulukumba dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sangatlah baik walaupun masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Semoga pemerintah terus membela hak-hak para petani khususnya petani cengkeh agar kesejahteraan meningkat. Karena dengan meningkatnya kesejahteraan petani maka secara otomatis meningkat pula ketahanan pangan di Indonesia.

Peranan pemerintah Desa merupakan cara atautindakan yang dilakukan olehseorang pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dankewajibannya. Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan petanilh cengkeh di kabupaten Bulukumba yaitu:

1. Memberikan pupuk, racun ulat, bibit cengkeh setahun sekali.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani bagaimana cara menanam cengkeh yang baik atau yang lebih tepat.

## **1. Regulasi**

Peran sebagai pengarah dalam regulasi pelayanan pertanian, pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan mementau aturan main sistem pelayanan

pertanian, menjamin keseimbangan berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan pertanian, dan menyusun rencana strategis untuk keseluruhan sistem pertanian. Sebagai regulator, pemerintah melakukan pengawasan untuk menjamin agar organisasi pelayanan pertanian memberikan pelayanan yang bermutu. sedangkan sebagai pelaksana dapat melalui sarana pelayanan pertanian, dimana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu.

Regulasi disini bagaimana cara pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu, dimana peraturan ini menggambarkan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya petani cengkeh. Sehingga pencapaian tujuan pemerintah yang diinginkan. Seperti yang di ungkapkan dalam hasil wawancara peneliti oleh Kepala Bidang Pertanian.

Apa saja peran anda sebagai Kepala Bidang Pertanian dalam menjalankan program :

“selaku pemerintah daerah, pemerintah telah membuat aturan dan memberdayakan masyarakat petani cengkeh, dengan bentuk penyuluhan, dan bimbingan kepada petani cengkeh”. (hasil wawancara W, 10 agustus 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa regulasi atau aturan yang di buat oleh pemerintah kabupaten bulukumbah khususnya dinas pertanian telah membuat aturan bagaimana memberdayakan petani khususnya petani cengkeh agar dapat berkembang dan dapat menjadi petani yang cerdas dengan berbagai penyuluhan yang telah terfasilitasi oleh pemerintah.

Hasil wawancara dengan penyuluh yang mengatakan bahwa :

“Sistem penyuluhan yang diberikan terhadap petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang kabupaten Bulukumba berupa sistem pemberian materi tentang budidaya tanaman cengkeh yang baik dan tepat untuk menghasilkan produksi cengkeh yang banyak. Materi-materi yang diberikan berupa materi cara menanam cengkeh yang benar, cara pemupukan seperti pemberian pupuk dosis dan waktu pemberian pupuk yang benar”. (wawancara penulis dengan AW, 11 Agustus 2016).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kegiatan penyuluhan kepada petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba memberikan pemahaman kepada petani agar dapat menanam cengkeh dengan tepat guna dan kegiatan penyuluhan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat mandiri dan mengetahui cara menanam cengkeh dengan benar.

Hasil wawancara oleh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya penyuluhan ini kami sangat senang atas upaya pemerintah dalam membantu kami, akan tetapi seringkali kami kurang mendapatkan informasi mengenai penyuluhan ini sehingga kami sebagai masyarakat kecil kurang mengetahui proses menanam cengkeh yang baik dan benar”. (hasil wawancara penulis dengan C, 11 Agustus 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian penyuluhan kepada masyarakat khususnya petani cengkeh tidak merata, sehingga ini masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga apa yang diinginkan masyarakat untuk mengetahui cara penanaman cengkeh yang baik dan benar dapat tercapai.

Merangkum dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi atau aturan yang di buat oleh pemerintah sudah berjalan dengan optimal meskipun masih perlu ada perbaikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan atau regulasi dalam pemberdayaan petani cengkeh di kabupaten

bulukumba. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya khusus agar kesejahteraan petani segera membaik.

## 2. Pelayanan

Pelayanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, yang dapat diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan dapat dikatakan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.

Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik harus memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan agar tercipta keharmonisan antar masyarakat dan pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Pelayanan yang dimaksud disini bagai mana pemerintah menjadi fasilitator atau menjembatani petani cengkeh yang ada di kabupaten bulukumba sehingga masyarakat dapat mengetahui cara-cara menanam, memupuk cengkeh yang baik dan benar, sehingga produksi cengkeh di kabupaten bulukumba produksinya meningkat dan dapat mensejahterakan kehidupan petani.

Hasil wawancara dengan kepala bidang kehutanan dan bulukumba yang mengatakan bahwa :

“ Pemerintah kabupaten Bulukumba memiliki tugas pokok yang diberikan ke masyarakat petani yaitu memberdayakan petani, khususnya petani cengkeh di bulukumba. Oleh karena itu kami sebagai fasilitator dari masyarakat sedia mungkin memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dimana kami telah membuat berbagai program kepada masyarakat di antaranya program penyuluhan yang di mana ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dan di jadikan agenda

rutin, yang di mana untuk meningkatkan produktifitas panen cengkeh di daerah kami”. (hasil wawancara penulis dengan AW, 23 agustus 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pelayanan yang di Desa Benteng Gantarang berikan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya petani cengkeh di kabupaten bulukumba telah di jalankan dengan baik oleh para pegawai yang bekerja di dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bulukumba dengan mengikuti prosedur yang telah di buat oleh pimpinan kantor dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bulukumba.

Hasil wawancara dengan penyuluh yang mengatakan bahwa :

“kegiatan penyuluhan diadakan selama 3 kali atau 2 kali dalam sebulan di kabupaten bulukumba khususnya untuk petani cengkeh dan pelayanan penyuluhan di lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani cengkeh. Adapun media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan di kabupaten bulukumba dalam memberdayakan petani cengkeh adalah dalam bentuk brosur, audio visual dll”. (hasil wawancara dengan S.E tanggal 24 agustus 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa Kegiatan penyuluhan untuk petani cengkeh ini di tentukan oleh tingkat kebutuhan masyarakat sehingga para penyuluh dalam hal ini dari pemerintah dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bulukumba dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarkat petani cengkeh.

Hasil wawan cara dengan masyarakat petani cengkah yang mengatakan bahwa :

“ Pelayanan yang di berikan oleh pemerintah mengenai penyuluhan kepada kami saya belum merasa puas karena belum meningkatkan produksi cengkeh karena kurang tersedianya bibit bibit cengkeh unggul, pupuk, racun pemberantas hama, dana lain-lain. Karena bantuan pemerintah mengenai bibit cengkeh, pupuk, ataupun semacamnya ini di lakukan selama musim

cengkeh di berikan satu atau dua kali saja”. (hasil wawancara penulis dengan RJ, tanggal 24 agustus 2016)

Dari hasil wawan cara di atas dapat di simpulkan bahwa bukan hanya penyuluhan yang diinginkan masyarakat akan tetapi masyarakat membutuhkan pelayanan di bidang bantuan-bantuan seperti bibit, pupuk, maupun racun pembasmi hama gara dapat meingkatkan produktifitas cengkeh. Dengan kata lain harapan masyarakat belum sesuai, karena masyarakat belum puas dengan pelayanan yang di berikan oleh pemerintah setempat.

Merangkum dari semua hasil wawancara bahwa pelayanan pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh, belum maksimal. Dimana pelayanan yang di berikan kepada masyarakat belum sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat mengharapkan adanya bantuan-bantuan sebagai penunjang dalam peningkatan produktifitas pada saat panen cengkeh, agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat petani cengkeh.

### 3. Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai sebuah proses dengan nama orang untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan uga menekankan pada proses bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu keberhasilan dari suatu pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi yang di lakukan oleh individu atau masyarakat, makanya pemberdayaan perlu di lakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan

masyarakat kearah yang lebih baik. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan petani untuk pengentasan kemiskinan. Untuk itu pemerintah daerah melalui kewenangan pembuatan peraturan bisa memberdayakan petani. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan petani sebagai ujung tombak yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya.

Dalam hal ini pemerintah dapat mendorong petani agar bisa dilihat dari kelayakan usaha dan bukan hanya atas dasar agunan. Pemerintah dapat mendorong agar petani membangun kemitraan dengan usaha besar dalam semangat saling menguntungkan. Pemda harus mampu membuat sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia petani di daerah mereka masing-masing. Tentu pemerintah harus mempersiapkan forum dialog antara petanil dan penyuluh.

Hasil wawancara dengan kepala bidang yang mengatakan bahwa :

“kami sebagai pemerintah daerah berperan melalui pelaksanaan program-program pelatihan untuk meningkatkan produktifitas, sedangkan penyuluh berperan sebagai penyambung program-program pemerintah daerah agar sampai kepada petani dan mendampingi petani dalam proses peningkatkan kualitas petani, karena sebagai pelaku pembangunan perlu di berdayakan agar mereka mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta jalan keluar yang sesuai”. (hasil wawancara peneliti dengan RA, tanggal 25 agustus 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa peran pemerintah sangat mengoptimalkan kualitas petani agar dapat menciptakan petani-petani yang

memiliki kualitas. Karena sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membangun budaya yang berpusat pada pengetahuan.

Hasil wawancara dengan penyuluh yang mengatakan bahwa :

“program pemerintah yang di limpahkan kepada kami sebagai para penyuluh yang dimana kita di beri penekanan untuk mengembangkan dan menciptakan kualitas petani cengkeh yang ada di bulukumbah telah kami laksanakan dengan program kerja tetap kami akan tetapi di lapangan kami banyak mengalami kendala-kendala untuk memberdayakan peteni cengkeh misalnya, susahya mengajak petani untuk di adakannya kegiatan penyuluhan, juga partisipasi masyarakat masih kurang, dan rendahnya pendidikan para petani sehingga apa yang di sampaikan oleh para penyuluh kurang paham”. (hasil wawancara penulis dengan AD, 26 agustus 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa apa yang telah di lakukan oleh para penyuluh telah sesuai dengan program kerja yang di berikan oleh pemerintah daerah dengan kata lain sudah optimal, akan tetapi melihat kondisi di lapangan belum optimal karena adanya kendala-kendala yang di hadapi dalam membujuk petani cengkeh untuk mendengarkan informasi penting mengenai kualitas-kualitas pertanian yang akan menunjang aktifitas keseharian mereka khususnya dibidang pertanian cengkeh.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“ pemberian pelatihan dan pendidikan yang di berikan oleh pemerintah lewat penyuluhan sebenarnya sangat membantu bagi kami dalam memahami apa yang kami tidak pahami dalam pemberian penyuluhan bagi kami, akan tetapi dalam proses pemberian pengetahuan kepada kami kurang memahami apa yang di sampaikan oleh penyuluh, ini di karenakan karena banyak dari kami pendidikannya ada yang tidak tamat SD (tidak tau membaca) hingga hanya selesai di SD saja dll, tapi penyuluh tidak kehabisan akal untuk memberikan pemahaman kepada kami, penyuluh memberikan pemahaman kepada petani melalui selebaran brosur alat peraga dll”. (hasil wawancara penulis dengan K, tanggal 26 agustus 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan petani cengkeh melalui penyuluhan ini berjalan optimal karena pemberian pemahaman kepada para petani untuk mendapatkan ilmu terhadap tanaman cengkeh dan cara membudidayakannya itu berjalan sesuai dengan harapan.

Merangkum dari semua hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa program-program pemberdayaan petani cengkeh di kabupaten bulukumba itu berjalan optimal ini di karenakan suksesnya penyuluh memahami yang diinginkan masyarakat yang mayoritas pendidikannya kurang (ada yang tidak bersekolah hingga ada yang tidak sampai menyelesaikan sekolahnya).

Dalam rangka pemberdayaan petani melalui upaya peningkatan produksi , masih sangat diperlukan adanya intervensi dari pihak pemerintah. Bagaimana bentuk campur tangan tersebut dan pada tahapan mana pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan tegas. Hal ini untuk menghindari rasa ketergantungan petani terhadap pemerintah dan sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab pada para petani

### **C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang kabupaten bulukumba**

#### **1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Petani Cengkeh di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba**

##### **a. Faktor pendukung**

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung pelaksanaan program sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan dalam faktor pendorong suatu kegiatan pemberdayaan itu tidak lepas dari partisipasi pemerintah.

Faktor pendukung pemberdayaan petani cengkeh di Bulukumba sangat di pengaruhi oleh partisipasi masyarakat sebagai subjek dan peran pemerintah sebagai fasilitator.

b. Partisipasi masyarakat

pembangunan berkelanjutan mengindikasikan adanya dua perspektif yaitu pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi masyarakat setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Pemerintah berperan penting dalam proses pembangunan khususnya pada bidang pertanian cengkeh yang ada di kabupaten bulukumba. Bagaimana pemerintah berperan dalam proses peningkatan mutu dan kualitas pengetahuan para petani cengkeh yang ada di bulukumba dan mendukung proses ataupun program pemerintah menuju harapan yang ingin di capai. Dimana masyarakat menyadari bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama didepan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat petani cengkeh yang ada di Bulukumba. Sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bidang Pertanian.

Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan program pemerintah:

“Di dalam setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat terutama petani cengkeh sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya keikutsertaan masyarakat, kegiatan yang dilakukan tidak akan terealisasi dengan baik. Karena pemerintah daerah sangat diharapkan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pertanian cengkeh di bulukumba, agar program ini dapat tercapai”.(hasil wawancara penulis dengan AW, tanggal 28 agustus 2016)”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan setiap kegiatan pemerintah sangat penting karena tanpa masyarakat kegiatan tidak dapat berjalan maksimal.

Senada dengan hasil wawancara dengan penyuluh yang mengatakan bahwa :

“Dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang kami lakukan ini menambah wawasan keilmuan kami juga sebagai tim penyuluh untuk melihat kekurangan-kekurangan apa saja yang ada di tengah-tengah masyarakat hingga kami dapat memberikan solusi buat petani dalam mengembangkan hasil taninya khususnya cengkeh”. (hasil wawancara penulis dengan AD, tanggal 26 agustus 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan setiap antusias masyarakat ingin tahu tentang pertanian cengkeh maka akan menambah ilmu dari penyuluh karena akan menemukan hal-hal baru dan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh petani.

Hasil wawancara masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Kami selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintah karena kami ingin tahu cara bertani yang baik dan benar hingga mendapatkan hasil cengkeh yang melimpah tapi kadang kala kami kurang mendapatkan informasi sehingga kami biasa keterbelakangan dalam mendapatkan ilmu tentang pertanian cengkeh yang baik dan benar”.(hasil wawancara dengan AB, tanggal 26 agustus 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat sebahagian kurang mendapatkan informasi dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah sehingga pengetahuan akan peertanian cengkeh masih belum merata.

Merangkum dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat atau keikut sertaan masyarakat dalam setiap kegiatan yang di lakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat berjalan optimal meskipun masih ada masyarakat yang terlambat mendapatkan informasi akan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah.

#### c. Motivasi petani

Motivasi petani perlu di tumbuhkan untuk mendorong perna serta secara aktif dalam pengelolaan dan keberhasilan suatu program di bidang pertanian untuk itu upaya pelibatan petani dan pengembangan kegiatan di landasi oleh kepentingan masyarakat tani.

Pelaksanaanya perlu di integrasikan dengan aspek-aspek yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat, penyeimbang kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi.dengan adanya motivasi dari pelaku pemberdayaan dalam hal ini adalah petani cengkeh, penyuluh serta kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani.

Hasil wawancara dengan kepala bidang yang mengatakan bahwa :

“ dengan adanya motivasi dari petani maka akan meningkatkan kondisi internal yang membangkitkan petani untuk bertindak, serta mendorong petani mencapai tujuan tertentu, dan membuat tetap tertarik dalam

kegiatan yang akan di lakukan pemerintah khususnya”. (hasil wawancara dengan AW, tanggal 26 agustus 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dengan membangkitkan motivasi para petani akan mendorong petani untuk lebih tertarik untuk mengetahui tentang pertanian cengkeh. Senada dengan yang di katakan oleh para penyuluh yang mengatakan:

Hasil wawancara dengan penyuluh yang mengatakan bahwa :

“dengan memberikan motivasi kepada petani maka akan menambah daya tarik petani dalam mengembangkan hasil pertanian cengkeh dan memberikan ilmu bagaimana mereka dapat meningkatkan tarah hidup petani cengkeh dalam menghasilkan cengkeh-cengkeh yang berkualitas”. (hasil wawancara dengan H,tanggal 27 agustus 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dengan memberikan ilmu tentang pertanian cengkeh hingga menciptakan hasil cengkeh yang berkualitas maka masyarakat akan makin termotivasi dalam meningkatkan hasil cengkehnya.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya kegiatan pemerintah terutama dalam bidang penyuluhan yang membuat kami termotivasi untuk mengembangkan pertanian cengkeh di Bulukumba ini karena dengan serius mengembangkan tanaman cengkeh ini dan menghasilkan cengkeh yang berkualitas maka akan merubah taraf hidup kami sebagai petani makanya kami sering mengikuti kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan tanaman cengkeh karna kami ingintahu ilmunya bercocok tanam cengkeh dengan baik dan benar”. (hasil wawancara dengan AR, tanggal 27 Agustus 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pertanian cengkeh maka petani sangat termotivasi untuk menimbah ilmu untuk mngetahui tentang pertanian cengkeh.

Merangkum hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pemberian motivasi kepada petani maka setiap kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan optimal.

## 2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Faktor penghambat suatu program pemberdayaan adalah faktor-faktor yang menghambat jalannya program, sehingga perlu dikurangi atau diantisipasi agar tidak mengganggu program pemberdayaan petani cengkeh. Banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu program pemberdayaan petani cengkeh di antaranya:

### a. Kurangnya kesadaran petani

Efektifnya aturan dalam badan organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran petani untuk memperoleh atau melaksanakan suatu program pertanian. Namun hal tersebut yang kurang terlihat adalah petani masih rendah perhatian dan partisipasinya dalam memperoleh pengetahuan baru yang disebut adopsi inovasi petani.

Hasil wawancara dengan penyuluh pertanian yaitu:

“ Salah satu faktor penghambat pemberdayaan petani cengkeh di desa gantarang kurangnya kesadaran petani dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan oleh kehutanan dan perkebunan yang mengakibatkan petani malas mengelola cengkehnya, padahal cengkeh

adalah salah satu mata pengcahariannya””. (hasil wawancara penulis dengan AD, tanggal 26 agustus 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa kurangnya kesadaran petani membuat para petani cengkeh kekurangan hasil panennya dalam setiap kali panen dan kurangnya kesadaran petani pula yang menimbulkan pernyataan yang kurang mengenakkan kepada dinas pertanian yang kurang perhatian kepada masyarakatnya.

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat

Jika suatu masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Di samping itu penjajahan (kelompok kepentingan) juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) pada suatu masyarakat.

Terhambatnya suatu program pemberdayaan pada petani cengkeh yang merupakan kurangnya ilmu pengetahuan yang menyebabkan petani sulit menerima pembaharuan dalam bidang pertanian.

Hasil wawancara dengan dinas kehutanan dan perkebunan di kabupaten bulukumba yaitu:

“Kurangnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat para petani itu cenderung tidak bersemangat mengelola cengkehnya padahal kita ketahui bersama bahwa cengkeh itu salah satu komoditas dengan

harga tertinggi di pasaran””. (hasil wawancara dengan AW, tanggal 26 agustus 2016)

Dari hasil wawancara diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya peran ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pertanian juga berperan penting, karena tanpa adanya ilmu pengetahuan dan teknologi petani tidak dapat mencapai hasil yang maksimal,akan Tetapi sekarang di Kab. Bulukumba petani sudah bekerja sama dengan penyuluh di bantu dengan kelompok tani membina petani cengkeh dan memberikan pengetahuan secara formal maupun informal, serta pelatihan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan permasalahan tersebut di atas mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gnatarang Kecamatan Gnatarang Kabupaten Bulukumba, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani cengkeh di Desa Benteng Gnatarang Kecamatan Gnatarang Kabupaten Bulukumba sangat penting di mana pemerintah memfasilitasi petani dan mengadakan pembinaan kepada petani agar dapat berinovasi dan membuat kesejahteraan terhadap petani. Pemerintah disini berperan membuat regulasi kepada petani, memberikan pelayanan dan juga memberdayakan masyarakat petani agar dapat merubah taraf hidup masyarakat petani.
2. Dalam melaksanakan suatu kegiatan pemberdayaan ada yang disebut faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan faktor penghambat pemberdayaan petani cengkeh yaitu kurangnya kesadaran petani, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat, sedangkan faktor pendorong kegiatan pemberdayaan yaitu partisipasi masyarakat dan motivasi petani.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas dan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat petani cengkeh secara efektif dan efisien,

maka ada saran dari penulis yang mungkin bermanfaat bagi pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam lingkup daerah kabupaten Bulukumba .Saran yang kami ajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah agar pemerintah mampu memfokuskan diri untuk mengusahakan kesejahteraan petani cengkeh dengan lebih menyusun lagi konsep dan strategi pertanian secara mantap karena dengan meningkatnya kesejahteraan petani cengkeh maka secara otomatis produksi cengkeh pun akan meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried, Alam Syamsu, 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. PT Refika Aditama, Bandung
- Djohani, 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta : Bumi Aksara
- Dewi Haryanti. 2005. *Bedah Terapi Pertanian Nasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fahmi Irham. 2011. *Manajemen Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta
- Nugroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Nurdjaman, Progo, 2004. *Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
- Purwanto, 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Rahman, 2008. *Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*. Jakarta : PT Gramdia
- Rivai Veithzal, Muliadi Dedi, 2010. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali Press: Jakarta
- Siagian, 2009. *Administrasi Pembangunan*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Soekamto, 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sukino, 2013. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*. Pustaka Baru Press : Jogjakarta
- Suroso, 2007. *Riset Sumber daya Manusia dalam Organisasi*. Gramedia : Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta :PT Bumi Aksara

Syafiie Kencana, dkk., 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.



## Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Papan Pengenal Kantor Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab Bulukumba.

